

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut ketentuan hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1, terdapat penjelasan rinci mengenai pembagian kategori usaha menjadi mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dikelola oleh individu atau entitas bisnis yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Sedangkan usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha yang tidak memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan perusahaan lain, serta tidak tergolong sebagai anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, usaha menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi produktif yang juga bersifat independen, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak berhubungan sebagai anak perusahaan atau cabang dari entitas lain, serta tidak dimiliki atau dikuasai oleh usaha kecil maupun besar, dengan batasan tertentu mengenai jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pajak adalah kontribusi finansial yang harus dibayarkan kepada negara, yang sifatnya bersifat wajib dan dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kontribusi ini tidak memperoleh imbalan langsung atau balasan spesifik dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran umum yang terkait dengan fungsi-fungsi pemerintah. Sebagai contoh, Waluyo (2015:2) menyebutkan bahwa pajak berfungsi untuk mendukung pembiayaan aktivitas-aktivitas pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masyarakat seringkali enggan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan yang rumit, perkembangan intelektual dan moral yang tidak sejalan dengan kewajiban perpajakan, serta sistem pengawasan yang tidak berjalan efektif (Mardiasmo, 2019).

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah, terbukti dari kemampuannya untuk bertahan di tengah krisis dan

ketidakstabilan ekonomi. UMKM berperan penting dalam bidang perpajakan, meskipun kontribusi penerimaan pajaknya mungkin tidak sangat besar.

Kebanyakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Metro sudah tercatat sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, dari perspektif perpajakan, status ini belum sepenuhnya memenuhi syarat. Hal ini terlihat dari temuan awal yang menunjukkan bahwa pendaftaran UMKM sebagai wajib pajak seringkali hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan administratif atau persyaratan tertentu, seperti untuk keperluan pendanaan. Akibatnya, meskipun sudah memiliki NPWP, banyak UMKM yang belum menjalankan kewajiban pajaknya dengan semestinya. Salah satu masalah utama dalam pelaporan kewajiban pajak di daerah ini adalah kurangnya motivasi atau kesadaran dari pihak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil dari pemungutan pajak tidak secara langsung dirasakan manfaatnya oleh pembayar pajak, serta pendapatan yang diperoleh dari UMKM itu sendiri yang seringkali rendah atau tidak memadai.

Potensi yang sangat besar akan terwujud apabila pengelolaan dan pengembangannya dilakukan dengan efektif, sehingga dapat menghasilkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kuat dan berdaya saing. Seiring dengan bertambahnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun, kontribusi mereka dalam bentuk pajak akan meningkatkan pendapatan negara. Pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kontribusi dari para pelaku UMKM. Mereka menyadari bahwa kemajuan pembangunan sangat bergantung pada pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara. Namun, UMKM sering menghadapi kendala terkait dengan kewajiban perpajakan yang ada (Budi, 2013:1).

Kurangnya pemahaman dan rendahnya tarif pajak dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan membuat banyak wajib pajak merasa bahwa pajak adalah beban yang tidak berguna. Hal ini menyebabkan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan menjadi rendah. Akibatnya, usaha untuk memperluas dan meningkatkan penerimaan pajak menjadi semakin sulit untuk dilaksanakan. Keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan dana dari sektor pajak tidak hanya bergantung pada kinerja aparat pajak, tetapi lebih pada kemauan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Beberapa elemen lain yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mencakup berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, peningkatan kesadaran di kalangan wajib pajak, serta kenaikan tarif pajak adalah aspek-aspek yang turut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Khususnya dalam hal pelaporan kewajiban perpajakan, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hal ini menjadi hal yang sangat krusial. Laporan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menghitung rasio pajak tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian suatu negara dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan rasio pajak, pelaporan kewajiban perpajakan, terutama dalam pengisian SPT Tahunan, harus menjadi prioritas. Pemerintah pun merasa perlu untuk mengubah peraturan yang ada, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat potensi besar UMKM sebagai sumber pendapatan pajak negara dan pentingnya keadilan bagi pengusaha dengan omzet tertentu. Semakin berkembang dan meningkat jumlah pelaku UMKM, maka akan semakin kokoh pula perekonomian negara.

Untuk memperkuat upaya dalam meningkatkan motivasi wajib pajak UMKM agar lebih patuh dalam membayar pajak mereka, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pembaruan pada sistem administrasi perpajakan. Pembaruan ini mencakup penerapan teknologi informasi yang lebih mutakhir untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan kepada wajib pajak. Dengan harapan, hal ini akan berimbas pada peningkatan pelaporan kewajiban perpajakan dan penerimaan negara dari pajak (Ayem & Nofitasari, 2018). Perubahan dalam sistem administrasi perpajakan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan, dengan menyederhanakan prosedur pajak sehingga lebih mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak (Yunika Antari & Supadmi, 2019). Mengacu pada penjelasan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada "Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan: Studi Kasus pada Coffee Shop di Kota Metro."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap pelaporan kewajiban pajak pada usaha Coffee Shop di Kota Metro?
2. Bagaimana dampak kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban pajak pada usaha Coffee Shop di Kota Metro?
3. Bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan memengaruhi pelaporan kewajiban pajak pada usaha Coffee Shop di Kota Metro?
4. Apakah tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap pelaporan kewajiban pajak pada usaha Coffee Shop di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai berbagai tujuan seperti berikut ini:

1. Menelaah Apakah besaran tarif pajak memengaruhi Pelaporan Kewajiban Perpajakan pada Bisnis Coffee Shop di Kota Metro.
2. Menelaah Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berdampak terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan pada Bisnis Coffee Shop di Kota Metro.
3. Menelaah apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan pada Bisnis Coffee Shop di Kota Metro.
4. Menelaah bagaimana tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memengaruhi Pelaporan Kewajiban Perpajakan pada Bisnis Coffee Shop di Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup beberapa hal:

1. Untuk Penulis

Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya pemahaman serta memberikan pengalaman yang berharga, sekaligus memperluas kompetensi dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan tarif pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak, serta mendalami proses modernisasi yang terjadi dalam sistem administrasi perpajakan. Lebih jauh, hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya pelaporan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah pengetahuan teoretis,

tetapi juga memberikan implikasi praktis dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di lapangan.

2. Untuk Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tarif perpajakan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta peningkatan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai aspek terkait tarif perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat yang termasuk wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan akan terjadi kepatuhan yang lebih baik dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga akan membahas tentang modernisasi dalam administrasi perpajakan yang telah dilakukan, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Modernisasi ini meliputi berbagai inovasi teknologi dan prosedur baru yang dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Di samping itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana proses pelaporan pajak di kota Metro telah berkembang dan bagaimana proses ini dapat lebih ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak dapat melaporkan pajak mereka dengan lebih efisien dan akurat. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih baik dan lebih efisien di kota Metro.

3. Untuk Penelitian Mendatang

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan serta sumber informasi yang bermanfaat bagi para peneliti yang akan melakukan studi serupa di masa mendatang. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi tambahan referensi yang berharga, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pustaka yang signifikan untuk mendukung literatur dalam bidang terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam hal pengetahuan baru, tetapi juga memperkaya khazanah pustaka yang dapat diakses oleh akademisi maupun peneliti lainnya untuk keperluan riset lebih lanjut atau pengembangan teori di masa yang akan datang.